

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

BUMDes menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 menyatakan bahwa usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. BUMDes merupakan upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹⁴

BUMDes menurut pasal 1 angka 6 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan dalam pengelolaan aset, jasa, pelayanan dan usaha lainnya untuk menunjang kegiatan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Modal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁵

¹⁴ Amir, Gusnardi. *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. 2018. Taman Karya : Pekanbaru. Hal.49

¹⁵ Kadek Sumiasih, *Peran BUMDes dalam pengelolaan sektor pariwisata (studi di desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.7 No.4 Desember 2018 hal.568

b. Pendirian BUMDes

Landasan hukum pendirian BUMDes sesuai Undang-Undang No.72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa, berbadan hukum dan berpedoman pada Undang-Undang.¹⁶

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa. Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa maupun pihak ketiga.

BUMDes juga dibentuk untuk menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga sehingga tercipta lapangan pekerjaan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan

¹⁶ Amir, Gusnardi. *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. 2018. hal.51

dan pemerataan ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.¹⁷

c. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007, sebagai pedoman prinsip-prinsip pembentukan dan pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan dilaksanakan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes yaitu:

- 1) Kooperatif, kegiatan yang dikelola oleh BUMDes mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya
- 2) Partisipatif, pemerintah desa, masyarakat, maupun investor yang terlibat dalam kegiatan usaha BUMDes tergabung secara sukarela tanpa adanya paksaan, saling memberikan dukungan dan kontribusi yang nantinya dapat mendorong kemajuan dan perbaikan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha BUMDes diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama

¹⁷ *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*. hal.3

sehingga semuanya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk mengelola dan memajukan usaha BUMDes.

- 4) Transparan (keterbukaan) dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah desa, investor dan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes terkait dengan kepentingan masyarakat secara umum.
- 5) Akuntabel, pengelola kegiatan BUMDes mencatat seluruh aktivitas (transaksi) usaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Sustainabel, BUMDes menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha.¹⁸

d. Jenis Usaha BUMDes

Peran BUMDes harus mampu mendidik masyarakat untuk menabung, sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa mandiri secara finansial. Ada beberapa karakter masyarakat desa yang masuk dalam kategori perlu mendapat pelayanan utama BUMDes yaitu, masyarakat sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat yang melakukan kegiatan perekonomian yang bersifat informal, masyarakat dengan penghasilan rendah, masyarakat yang tidak memiliki sistem pemasaran yang baik.¹⁹

¹⁸ Pengadaan (*Eprocurement*). *Kenali jenis usaha BUMDes, hambatan pengelolaannya*. Pengadaan.web.id, 29 Oktober 2019

¹⁹ Amir, Gusnardi. *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. 2018. hal.53

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes sesuai dengan Pasal 19 menyatakan BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha dalam BUMDes memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, lumbung pangan, sumber daya lokal. Pengelolaan BUMDes dengan mengoptimalkan potensi desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat.²⁰

BUMDes mengklasifikasikan jenis usaha dalam 6 kegiatan usaha antara lain :

- 1) Bisnis Sosial : BUMDes tidak semata-mata mencari keuntungan saja namun lebih mengutamakan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Bisnis Uang : memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat melalui memberikan pinjaman modal, BUMDes memberikan dalam bentuk perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.
- 3) Bisnis Penyewaan : BUMDes menjalankan bisnis persewaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini akan menambah pendapatan desa.

²⁰ *Ibid.*, hal.8

- 4) Lembaga Perantara : sebagai penghubung penjualan hasil pertanian masyarakat di desa untuk diperjualbelikan dipasar, sehingga petani tidak mengalami kesulitan menjual hasil panen.
- 5) Perdagangan : BUMDes menjual hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa maupun dijual pada pasar yang lebih luas diluar desa.
- 6) Usaha Bersama : sebagai induk usaha di desa, BUMDes berperan sebagai pengelola unit usaha desa sehingga dapat mengayomi dan mengembangkan kegiatan usaha di desa untuk saling memberikan manfaat.²¹

e. Faktor BUMDes tidak berkembang dan Strategi Pengembangan BUMDes

Masih lemahnya pembangunan Sumber Daya Manusia, kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami konsep dasar BUMDes. Ketidakmampuan memetakan potensi desa sebagai peluang usaha, mengelola keuangan usaha, serta kurangnya keberanian pemerintah desa mengeluarkan modal untuk BUMDes menjadi faktor penghambat dalam perkembangan pengelolaan BUMDes.²²

²¹ Amir, Gusnardi. *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. 2018. hal.54

²² Deden, Dinar, Kosasih. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan BUMDes. *Jurnal.unma.ac.id* Vol.8 No.2 Tahun 2020

Strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan inovasi yang dilakukan oleh BUMDes, meliputi sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes, pelaksanaan Musyawarah Desa, pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial, melakukan analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara maupun usaha bersama yang dikembangkan secara kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDes antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, terakhir, pihak Desa melakukan diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.²³

2. Transformasi Penggerak Perekonomian

a. Pengertian Transformasi

Transformasi lebih merujuk pada realitas proses perubahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transformasi berarti perubahan bisa berupa bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya.²⁴ Transformasi merupakan proses perubahan yang memiliki ciri-ciri, adanya perbedaan merupakan aspek yang paling penting di dalam proses transformasi, konsep ciri atau identitas yang menjadi acuan perbedaan di dalam suatu proses transformasi.

Dikatakan sesuatu telah terjadi proses transformasi, maka harus jelas perbedaannya seperti ciri sosial, konsep tertentu meliputi : pemikiran,

²³ *Ibid.*, hal 9

²⁴ Yandianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung : Percetakan Bandung, 1997), 208.

ekonomi ataupun gagasan serta ciri penerapan dari sesuatu konsep. Transformasi juga bersifat historis, karena proses yang menggambarkan adanya perbedaan kondisi secara historis hal ini dapat dilihat dari kondisi yang berbeda di waktu yang berbeda.²⁵

Laseau mengatakan transformasi merupakan proses perubahan secara berangsur-angsur, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.

Laseu memberikan kategori transformasi dengan berbagai sifat : pertama *tipologikal* (geometri) bentuk geometri yang berubah dengan komponen pembentuk dan fungsi ruang yang sama. Kedua *gramatikal* hiasan dilakukan dengan menggeser, memutar, mencerminkan, menjungkirbalikkan. Ketiga *refersal* (kebalikan) pembalikan citra pada figur objek yang akan ditransformasi dimana citra objek dirubah menjadi citra sebaliknya. Keempat *distortion* kebebasan perancang dalam beraktifitas.²⁶

Transformasi tidak terjadi begitu saja, tapi melalui sebuah proses, Habraken menguraikan proses transformasi merupakan perubahan yang

²⁵ Ernita Dewi, *Transformasi Sosial dan Nilai Agama*, Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 1, April 2012. hal.113-114.

²⁶ Stephanie Jill Najon, *Transformasi Sebagai Strategi Desain*, Media Matrasain, Vol.8, No.2 (Agustus, 2011), hal.120.

terjadi secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Tidak dapat diduga kapan dimulainya dan sampai kapan proses itu akan berakhir tergantung dari faktor yang mempengaruhinya. Perubahan yang terjadi mempunyai keterkaitan erat dengan emosional (sistem nilai) yang ada dalam masyarakat dan berkesinambungan serta mengandung dimensi waktu dan perubahan sosial budaya masyarakat yang muncul melalui proses panjang terkait dengan aktifitas-aktifitas yang terjadi pada saat itu.

b. Proses Transformasi

Proses transformasi melalui tiga tahap yaitu Invesi merupakan perubahan dari dalam masyarakat yang berisi penemuan baru, kemudian perlahan-lahan muncul perubahan. Proses kedua dalam transformasi yaitu difusi adanya pengkomunikasian ide, konsep baru serta upaya perubahan masyarakat secara lebih luas. Ketiga adalah konsekuensi berupa tahap adopsi ide atau gagasan baru dalam masyarakat, tahap ini biasanya ada hasil perubahan yang muncul di masyarakat.²⁷

c. Pengertian Perekonomian

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem perekonomian

²⁷ *Ibid.*, hal.120

terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi.²⁸

Grossman dan Manu, menyebutkan sistem ekonomi adalah komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.²⁹

Orientasi pembangunan daerah pedesaan diarahkan pada sasaran, penguatan ketahanan pangan, menunjang pengembangan sektor industri dan mendorong ekspor, memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan yang diharapkan dapat mengurangi arus penduduk pedesaan berurbanisasi ke kota-kota besar serta mengembangkan kerja sama antar daerah pedesaan untuk memperkokoh struktur perekonomian pedesaan.

d. Dasar Hukum Perekonomian

Khaldun menerapkan kesamarataan dan kenetralan, artinya tidak adanya keberpihakan kepada kalangan tertentu, karena pada dasarnya dalam Islam posisi manusia dalam pandangan Allah sama sebagaimana firmanNya dalam Al-Qur'an tercantum pada surat Al-Hujurat ayat 13³⁰ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

²⁸ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Sistem Perekonomian*. <https://id.m.wikipedia.org>

²⁹ Sistem Perekonomian dan Macam-macam Sistem Perekonomian, postberbagaireviews.com
9 Desember 2016

³⁰ Departemen Agama RI, Robbani. *Al Quran dan terjemahnya.*, hal. 518

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya :

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”
Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13.

Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Islam memiliki pandangan yang sama mengenai kesetaraan sosial masyarakat, yang membedakan masing-masing dari manusia adalah ketakwaannya, bukan derajat atau status sosialnya, hal ini juga berlaku pada sistem pemungutan pajak dan lainnya. Khaldun memahami benar konsep optimal, hal ini digambarkan pada pengaruh pajak terhadap intensif dan produktivitas.

Khaldun menyimpulkan bahwa faktor terpenting untuk proyek usaha yaitu meringankan kegiatan beban bisnis dengan menjamin keuntungan lebih besar, melalui penjelasan bahwa ketika pajak dan bea cukai ringan, rakyat akan memiliki motivasi dan dorongan untuk lebih aktif berusaha. Khaldun juga menganalisis efek dari pengeluaran belanja pemerintah dalam perekonomian yang dipelajari oleh Keynes, menurutnya penurunan dalam menghasilkan pajak disebabkan juga oleh penurunan belanja pemerintah.³¹

³¹ Nurul Huda. *Ekonomi Pembangunan Islam*. hal. 34

e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) menurut Ginanjar Kartasasmita, merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan.³² Pemberdayaan menurut Wuradji merupakan proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.³³

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan kelompok lemah dalam masyarakat, sedangkan sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.³⁴ Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.³⁵

Produksi, distribusi dan konsumsi, merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus sebagai proses yang

³² Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), hal. 145.

³³ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal.3.

³⁴ *Ibid.*, hal. 59-60.

³⁵ Gunawan Sumodiningrat, *"Membangun Perekonomian Rakyat"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 24.

berkesinambungan. Proses ini berjalan secara alamiah dengan perkembangan masyarakat dibidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Proses alamiah secara ekonomi menghasilkan produksi yang dikonsumsi.³⁶

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang dengan secara swadaya untuk mengelola Sumber Daya apapun yang dapat dikuasainya, ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Upaya pembangunan ekonomi masyarakat mengarah pada perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

3. Kesejahteraan Masyarakat

a. Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara untuk bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri menjalankan fungsi sosialnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan, meliputi rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan dan pemberian jaminan sosial.

Tujuan kesejahteraan antara lain, meningkatkan taraf kualitas dan kelangsungan hidup, mewujudkan kemandirian melalui pemulihan fungsi sosial, mencegah masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan ketahanan sosial, menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian

³⁶ *Ibid.*, hal.24

masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial.³⁷

b. Dasar Hukum Kesejahteraan

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada anggota masyarakat dan sangat mencegah sirkulasi kekayaan hanya sebatas orang tertentu saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr Ayat 7³⁸ :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Artinya :

“Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7)

Kandungan Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 menjadi bukti konkret totalitas Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan khususnya dalam distribusi kekayaan. Kekayaan yang diciptakan Allah SWT dan

³⁷ Dantika, Yanuardi. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul*. Eprints.uny.ac.id 28 Juni 2015. Lumbung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta. hal.7

³⁸ Departemen Agama RI, Robbani. *Al Quran dan terjemahnya.*, hal. 547

dianugerahkan kepada manusia itu tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang saja, pemerataan dalam distribusi kekayaan menjadi sebuah keharusan di dalam Islam, agar tidak menimbulkan kesenjangan yang tinggi, negara wajib mewujudkan konsep keseimbangan dalam masyarakat khususnya pendistribusian kekayaan guna meningkatkan kesejahteraan.³⁹

Sardar dalam jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan, menuliskan kesejahteraan Islam menurut P3EI, sebagai berikut :

- a) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.⁴⁰
- b) Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan,

³⁹ Nurul Huda. *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Jakarta : Prenamedia Group, 2015) hal. 29

⁴⁰ Sardar, *Kesejahteraan dalam Prespektif Islam pada Karyawan Bank Syariah*. (Jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan Vol.3 No. 5 Mei 2016) hal. 394

sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.⁴¹

Fallah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁴²

c. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴³ Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Walter Fridlander menyatakan kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari usaha lembaga sosial ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat

⁴¹ *Ibid.*, hal. 395

⁴² Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) hal.

⁴³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan secara penuh untuk meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Sudut pandang masyarakat atas taraf kehidupan yang lebih baik dari warganya diwujudkan dengan penyediaan berbagai bentuk usaha kesejahteraan sosial yang mengacu pada program pelayanan dan berbagai kegiatan untuk menjawab kebutuhan, masalah yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan hal diatas dapat dirasakan bahwa kesejahteraan sosial tidak bermakna bila tidak diterapkan dalam bentuk usaha kesejahteraan sosial yang nyata bagi masyarakat.⁴⁴

4. Desa Wisata

a. Pengertian Desa

Desa menurut Soenardjo merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁴⁵

⁴⁴ Isbandi rukminto adi, psikologi, *Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 7

⁴⁵ Indrasto Wahyudi. *Peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Senada Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa*, hal. 45

Maschab mendefinisikan desa secara sosiologis adalah kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dan menetap pada suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik, memiliki rasa kekeluargaan, gotong royong dan corak kehidupan masyarakat setempat relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.⁴⁶

Dalam Undang-Undang No 6 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

Desa membangun mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam serta lingkungan berkelanjutan. Sedangkan aspek yang menjadi prioritas dalam desa membangun antara lain peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya alam lokal yang tersedia.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 45

Pemerintah desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta bertanggung jawab dapat meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum serta ketahanan sosial budaya masyarakat dalam mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional melalui pengembangan desa wisata.⁴⁷

b. Desa Wisata

Desa wisata merupakan Nuryanti menyatakan sebuah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi serta pemberian fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu berdasarkan tata cara yang berlaku untuk dijadikan pedoman. Berkaitan dengan konsep pengembangan desa wisata yang menekankan proses memajukan desa wisata.⁴⁸

Desa wisata merupakan bagian dari swadaya dan swakarsa pada aktivitas sosial masyarakat dalam meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Bentuk integrasi dari desa wisata merupakan atraksi, akomodasi serta pemberian fasilitas pendukung yang dikelola secara

⁴⁷ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Indeks Desa Membangun 2015*. hal. 2

⁴⁸ Made, Chafid, M.Baiquni. *Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jati Luwih Tabanan Bali*. Jurnal Kawistara, Vol.3 No.2 Agustus 2013. Universitas Udayana Bali. hal.131

terstruktur sehingga menyatu dengan kehidupan bermasyarakat, termasuk tradisi yang berlaku.⁴⁹

Kriteria Desa Wisata menurut Muliawan sebagai berikut :

- 1) Memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas (merupakan atraksi wisata) baik berupa karakter fisik berupa lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan social budaya kemasyarakatan.
- 2) Adanya dukungan dan kesiapan fasilitas pendukung kepariwisataan terkait dengan kegiatan wisata pedesaan.
- 3) Desa memiliki interaksi dengan pasar yang dapat dilihat dari banyaknya kunjungan wisatawan ke lokasi tersebut.
- 4) Dukungan partisipasi masyarakat merupakan bentuk pengembangan desa terkait dengan kegiatan kepariwisataan.⁵⁰

Syarat Desa dikatakan Desa Wisata dengan memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga mudah dikunjungi oleh wisatawan dengan menggunakan berbagai sarana transportasi. Desa memiliki obyek yang menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan khas yang dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata. Saling memberikan dukungan antara masyarakat dan aparat desa terhadap desa wisata dan para

⁴⁹ Ervina Desi. *Pengembangan Desa Wisata*. 2018. Sukoharjo : CV.Graha Printama Selaras. hal.47

⁵⁰ T.Prasetyo. *Strategi pengembangan potensi desa wisata Brajan Kabupaten Sleman*. Jurnal Media Wisata. Vol.12 Nomor 2 November 2014. Akademi Pariwisata Yogyakarta. hal 148

wisatawan yang datang, dengan memberikan rasa aman, menyediakan akomodasi dan tenaga kerja yang memadai.⁵¹

c. Tujuan Pembangunan Desa Wisata

Pembentukan Desa Wisata bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan kepariwisataan, desa wisata yang menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan maupun investor dapat meningkatkan kualitas wisata desa yang dikelola menjadi lebih baik. Pemerintah desa menerapkan nilai sapta pesona untuk menumbuhkan sikap positif masyarakat sehingga mau dan mampu terlibat dalam pengelolaan desa wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.⁵²

Djiwandono menyebutkan beberapa tujuan pembangunan desa wisata, sebagai berikut :

- 1) Tujuan ekonomi, meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- 2) Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- 3) Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.

⁵¹ Artika Dwi, *Menggali Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*, hal 10

⁵² Ervina Desi. *Pengembangan Desa Wisata.*, hal.48

- 4) Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.⁵³

d. Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata sebagai suatu proses mengembangkan atau memajukan desa wisata, melalui usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata.

Komunitas lokal tumbuh dan hidup berdampingan dengan objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling berkaitan. Unsur penggerak utama kegiatan desa wisata di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan. Pengembangan desa wisata dalam pemberdayaan ini harus memperhatikan tiga hal pertama menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya tarik yang dimiliki, serta melindungi masyarakat (dalam persaingan yang sehat).

⁵³ *Ibid.*, hal. 242

Strategi yang dilakukan salah satunya melalui *community enterprises* yaitu meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha berbasis komunitas. *Community enterprises* berperan mengembangkan potensi dan kemampuan sesuai dengan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kerja sama. Menciptakan wahana untuk latihan peningkatan ketrampilan Sumber Daya Manusia dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan swadaya, menciptakan peluang kerja di wilayah pedesaan, memperkuat basis ekonomi pedesaan serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar desa⁵⁴

Upaya untuk mencapai keberhasilan pengembangan desa wisata perlu menurut Soemarno,

- a) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi di bidang-bidang kepariwisataan.
- b) Kemitraan atau kerja sama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah
- c) Kegiatan pemerintahan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti rapat-rapat dinas, pameran

⁵⁴ Tadjuddin Noer Effendi, "Strategi Pengembangan Masyarakat :Alternatif pemikiran Reformatif," *Sosial Politik* (Vol.3 No.2 November 1999), 121

pembangunan, dan upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.

d) Promosi Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media.

e) Membina organisasi masyarakat. Penduduk desa yang biasanya merantau kemudian mudik atau tradisi lain dapat dibina dan diorganisir untuk memajukan desa wisata mereka.

e. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program pengembangan desa wisata.

Keikutsertaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemauan, kesempatan, dan kemampuan dari masyarakat tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan desa wisata dapat mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan.⁵⁵ Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan model pengembangan pariwisata berbasis

⁵⁵ Ade Jafar. Risna Resnawati, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggajati Kuningan*. hal.40-43

masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan:

- a) Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, parameter yang digunakan untuk menentukan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah keterlibatan dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata.
- b) Partisipasi masyarakat lokal dalam tahap implementasi parameter keterlibatan di dalam pengelolaan usaha pariwisata, misalnya, sebagai pengelola penginapan, pengelola rumah makan, pemandu wisata, karyawan hotel, dan pengelola atraksi wisata. Keterlibatan masyarakat lokal dalam tahap implementasi dalam arti pemanfaatan peluang terlihat minim, wujud partisipasi itu ada bentuknya lebih pada pengelolaan usaha berskala kecil.
- c) Partisipasi masyarakat lokal dalam tahap pengawasan memiliki peran kontrol yang sangat substansial dalam pengembangan desa wisata karena kontrol terhadap proses pengambilan keputusan harus diberikan kepada mereka yang nantinya bertanggungjawab pada pelaksanaan pengembangan termasuk kegagalan atau dampak yang terjadi akibat pengembangan desa wisata.

f. Jenis Desa Wisata

Terdapat dua jenis desa wisata menurut pengelolaannya, maupun pola pengembangannya :

1) Pola terstruktur (*enclave*)

Pada umumnya lokasi wisata terpisah dari masyarakat. Lahan digunakan untuk mengelola wisata terbatas, hal ini mempermudah perencanaan yang dapat terorganisir dengan baik sehingga mampu menyediakan fasilitas yang memadai untuk menarik wisatawan berkunjung ke desa wisata.

2) Pola terbuka (*spontaneus*)

Pola ini menyatukan masyarakat lokal dengan kawasan beserta struktur kehidupan, baik ruang maupun pola. Pendapatan yang diperoleh dari wisatawan terdistribusi secara langsung dan dapat dinikmati oleh penduduk lokal.⁵⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi dasar dalam melaksanakan penelitian, hal ini dilakukan untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian yang akan dilakukan, berikut adalah hasil penelitian yang dijadikan referensi :

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

⁵⁶ Ervina Desi. *Pengembangan Desa Wisata.*, hal.49

Kadek Sumiasih, Peran BUMDes dalam pengelolaan sektor pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). Pengembangan pariwisata di Bali memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan melalui BUMDes dengan meningkatkan potensi wisata dan pengelolaan yang efektif untuk mensejahterakan masyarakat desa. Persamaan dengan penelitian ini merupakan bentuk pengelolaan sektor wisata yang difasilitasi oleh BUMDes. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada sektor pariwisata yang dikelola yakni wisata alam, budaya dan jasa pariwisata.⁵⁷

Nurmaulida, Peran BUMDes dalam pengelolaan objek wisata di desa Denai Lama Kecamatan pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat serta berusaha untuk mengetahui faktor pendukung maupun penghambatnya dengan hasil penelitian masyarakat yang sebelumnya memiliki ekonomi rendah, setelah adanya objek wisata dapat dilihat ekonomi masyarakat melalui program yang diberikan bumdes hal ini juga menjadi persamaan dengan peneliti. Perbedaan penelitian terletak pada program Kegiatan Belajar Masyarakat-rumah produksi (PKBM) dan budaya sanggar tari.⁵⁸

Putri, Aprina. Peran Pencapaian Tujuan BUMDes Mandiri Jaya dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini menyatakan kendala yang ada

⁵⁷ Kadek Sumiasih, *Peran BUMDes dalam pengelolaan sektor pariwisata (studi di desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.7 No.4 Desember 2018

⁵⁸ Nurmaulida, Abdullah. *Peran Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan objek wisata di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Volume 6 No.2 Tahun 2018. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

belum adanya wadah untuk menjual hasil pertanian desa ke pasar tradisional, selain itu pendirian bantuan warung yang telah terbangun letaknya cukup jauh antara warung satu dengan lainnya. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada penggalian faktor-faktor kendala BUMDes. Perbedaan ada pada objek BUMDes yang terfokus pada program pinjaman modal usaha warung.⁵⁹

Wafia, M.Insan. Pemanfaatan Wisata Mata air yang dikelola oleh BUMDes di desa Belik. Potensi yang dikembangkan adalah sumber mata air, untuk mengatasi kendala yang ada pihak desa perlu melakukan pendampingan secara intensif dan inklusif untuk mendukung terwujudnya pengembangan desa wisata. Belum terbentuknya peraturan yang mengatur pendirian BUMDes dan roadmap desa wisata. Persamaan terletak pada pengembangan desa wisata yang berbasis potensi unggulan desa.⁶⁰

Ristiana, Amin. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. Tahapan proses pemberdayaan dimulai dari persiapan, pengkajian perencanaan alternatif kegiatan, rencana aksi, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Pemberdayaan masyarakat menjadi tujuan adanya BUMDes merupakan persamaan dalam penelitian yang sedang

⁵⁹ Putri, Aprina. *Peran Pencapaian Tujuan BUMDes Mandiri Jaya dalam pengelolaan Dana Desa*. International Journal of Social Science and Business, Vol.4 No.1 Tahun 2020. Jurnal Undiksha.

⁶⁰ Wafia, M.Insan. *Pemanfaatan Wisata Mata Air yang dikelola oleh BUMDes di Desa Belik*. Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat, Vol. 1 No.1. Tahun 2020. Universitas Surabaya.

diteliti. Objek pengembangan desa wisata melalui Sumber Daya Alam menjadi perbedaan, karena peneliti meneliti wisata buatan.⁶¹

2. Transformasi Penggerak Perekonomian

Faris, Rima. Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandung Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengembangan desa wisata dapat dilakukan melalui media promosi, partisipasi masyarakat didukung oleh kebijakan pemerintah desa untuk mengontrol kegiatan desa wisata. Perbedaan dalam penelitian ini mengenai fokus desa wisata yang mengembangkan potensi pemanfaatan hasil pertanian, cara memelihara ternak sapi, sedangkan persamaannya ada pada pemberian fasilitas desa pendukung desa wisata sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk meningkatkan ketertarikan wisatawan yang datang.⁶²

Dodi, Joni, Alia. Pengembangan Pariwisata Perdesaan (suatu usulan strategi bagi desa wisata Ketingan). Strategi yang dikembangkan melalui peningkatan pemasaran, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas pelayanan dan memelihara mutu dari obyek wisata yang ditawarkan. Persamaan penelitian ini yaitu konsep suasana pedesaan yang ditawarkan kepada wisatawan, permainan di area persawahan, sedang perbedaan ada pada

⁶¹ Ristiana, Amin. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep*. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment. Volume : 4 Juni 2020. Universitas Negeri Semarang.

⁶² Faris, Rima. *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandung Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Teknik POMITS Vol.3 No.2 Tahun 2014. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

keterlibatan masyarakat yang masih kurang dalam pengembangan desa wisata.⁶³

Choirul, Markus, Adi, Ariwan. *Perspektif pengembangan pariwisata Rawa Indah di Desa Wisata “Alas Sumur” Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso*. Konsep desa wisata ini adalah dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dominan dalam kegiatan pengembangan wisata desa. Persamaan dalam tujuan mendukung kemajuan ekonomi wilayah melalui pengembangan pariwisata, sedang perbedaan penelitian ini ada pada objek wisata alam yang dikelola oleh pemerintah desa, sedang wisata yang sedang diteliti merupakan wisata buatan.⁶⁴

Marlena. *Potensi dan kekayaan desa dalam rangka pembangunan ekonomi (Studi di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)*. Hasil penelitian menyatakan bahwa potensi desa dan kekayaan desa yang dapat dikembangkan merupakan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan sarana prasarana untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi desa. Perbedaan penelitian ini ada pada fokus penelitian yang diteliti dan diulas secara luas mengenai potensi desa dalam lingkup Kecamatan di Boyolangu. Penggalan potensi desa menjadi persamaan

⁶³ Dodi, Joni, Alia. *Pengembangan Pariwisata Perdesaan (suatu usulan strategi bagi desa wisata Ketingan)*. Jurnal Bumi Lestari, Vol.08 No.2 Agustus 2008. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

⁶⁴ Choirul, Markus, Adi, Ariwan. *Perspektif pengembangan pariwisata Rawa Indah di Desa Wisata “Alas Sumur” Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso*. e-Business dan fintech sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi lokal. 2018. Universitas Jember.

dalam penelitian ini meskipun hanya fokus pada desa Kendalbulur di Kecamatan Boyolangu.⁶⁵

Rizki Febri. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Potensi Lokal sebagai Penggerak Ekonomi Desa. Penelitian bertujuan mengurangi kesenjangan pembangunan perkotaan dengan desa melalui pengembangan unit usaha BUMDes yang dikelola sesuai dengan potensi desa. Persamaan dengan penelitian ini pada usaha pemerintah desa untuk menjadikan desa mandiri melalui pemanfaatan potensi desa yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan meningkatkan pemahaman mengenai BUMDes. Penelitian tersebut masih membahas unit usaha secara luas, sedang peneliti fokus pada desa wisata.⁶⁶

3. Kesejahteraan Masyarakat

Made, Chafid, M.Baiquni. Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jati Luwih Tabanan Bali. Pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan wisata desa untuk dapat memberikan kontribusi. Perbedaan ada pada kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga pemikiran pengembangan desa wisata dilakukan oleh orang diluar desa, persamaan

⁶⁵ Marlana. *Potensi dan kekayaan desa dalam rangka pembangunan ekonomi (Studi di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)*. Jurnal Nusamba Vol.1 No.2 Tahun 2016. Universitas Tulungagung.

⁶⁶ Rizki Febri. *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Potensi Lokal sebagai Penggerak Ekonomi Desa*. Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan Vol.1 No 1 Published 31 Desember 2020. Universitas Nurul Jadid.

penelitian ini ada pada kebijakan pemerintah yang membangun kemitraan pada berbagai pihak untuk mendukung perkembangan desa wisata.⁶⁷

Bagus, Mahendra. Pengembangan Desa Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Penglipuran, Kecamatan Banglu, Kabupaten Bangli. Penelitian ini menyatakan bahwa pengembangan inovasi desa wisata dan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh pada kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Persamaan penelitian ada pada tujuan pengembangan wisata desa untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian kesempatan kerja pada masyarakat, sedangkan perbedaannya ada pada peran pemerintah desa Bangli yang memberikan kredit usaha, sedang program yang sedang diteliti pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengembangan potensi wisata desa dalam berbagai sektor.⁶⁸

Maria. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta. BUMDes memberikan pengaruh pada bidang ekonomi dan sosial. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan persamaan dalam penelitian ini atas pengembangan desa wisata, dengan perbedaan program

⁶⁷ Made, Chafid, M.Baiquni. *Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jati Luwih Tabanan Bali*. Jurnal Kawistara, Vol.3 No.2 Agustus 2013. Universitas Udayana Bali.

⁶⁸ Bagus, Mahendra. *Pengembangan Desa Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Penglipuran, Kecamatan Banglu, Kabupaten Bangli*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud, Vol.6 No.9 September 2017. Universitas Udayana Bali.

BUMDes tersebut kurang tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat belum maksimal dalam kegiatan desa.⁶⁹

Dantika, Yanuardi. Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Pengelolaan unit usaha pada BUMDes telah memberikan dampak positif pada masyarakat berupa peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini bahwa BUMDes Karangrejek semakin maju atas partisipasi masyarakat dan pendapatan yang dihasilkan BUMDes, perbedaannya ada pada belum maksimalnya seluruh unit usaha BUMDes yang ada.⁷⁰

M.Fajar, Ety. Dampak BUMDes terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung. BUMDes mendorong masyarakat untuk mulai membuka usaha baru sesuai dengan potensi masyarakat sebagai wujud partisipasi terhadap program desa. Peningkatan aset-aset yang dimiliki terus bertambah atas peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) menjadi persamaan dalam penelitian ini, dengan perbedaan belum maksimalnya kemampuan masyarakat dalam mengelola

⁶⁹ Maria. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta*. Modus Vol.28 Tahun 2016. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

⁷⁰ Dantika, Yanuardi. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul*. Eprints.uny.ac.id 28 Juni 2015. Lumbung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta.

usaha hal ini dikarenakan BUMDes belum memberikan pelatihan dan pembekalan pada pengelola BUMDes.⁷¹

4. Desa Wisata

Zakiyudin, Yudi. Pemanfaatan Dana Desa dalam pengembangan Desa wisata di Kurau Barat. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pembangunan sektor wisata telah dilakukan sesuai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Wisata desa tersebut fokus pada ekowisata pembibitan dan pemeliharaan mangrove, sedangkan tahapan pengelolaan sesuai dengan aturan pemerintah pusat maupun pemerintah desa dilakukan sama seperti yang sedang diteliti.⁷²

T.Prasetyo. Strategi pengembangan potensi desa wisata Brajan Kabupaten Sleman. Persamaan dalam penelitian ini merupakan wisata edukasi yang diminati masyarakat, penelitian ini mengembangkan wisata alam garap sawah, mencangkul, menanam padi, memancing gurami, tangkap lele maupun wisata lainnya yang telah terfasilitasi menjadi perbedaan pada objek penelitian yang sedang diteliti termasuk dalam wisata buatan.⁷³

⁷¹ M.Fajar, Ety. *Dampak BUMDes terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20. No.1 April 2019. Universitas Indonesia.

⁷² Zakiyudin, Yudi. *Pemanfaatan Dana Desa dalam pengembangan Desa wisata di Kurau Barat*. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial (Publicio) Vol.2 No.2 Tahun 2020 FISIP Universitas Panca Marga Probolinggo.

⁷³ T.Prasetyo. *Strategi pengembangan potensi desa wisata Brajan Kabupaten Sleman*. Jurnal Media Wisata. Vol.12 Nomor 2 November 2014. Akademi Pariwisata Yogyakarta.

Dian, Deden. Strategi Pengembangan Desa Wisata (studi kasus Desa Wisata Ponggok). Prioritas utama pengembangan desa wisata dengan menambah paket wisata budaya, selanjutnya menambah wisata alam, menambah fasilitas rekreasi buatan. Salah satu desa yang potensial berhasil dalam pengelolaan Dana Desa menjadi destinasi wisata yang menjadi persamaan, sedang objek dalam wisata yang dikembangkan menjadi perbedaan dalam penelitian ini sebuah wisata alam pemandian, sedang peneliti meneliti wisata buatan.⁷⁴

Neneng, Encang, Pawit. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. Pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal dalam pengembangan desa wisata dalam prinsip keorganisasian yang bersifat sukarela dan terbuka, demokratis dan mandiri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata didesa tersebut kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta anggaran, hal ini berbeda dengan desa wisata yang sedang diteliti karena memiliki Sumber Daya Manusia yang aktif dalam kegiatan desa.⁷⁵

Aditya, Hari, Cipto. Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. Penelitian ini menyatakan bahwa upaya peningkatan ekonomi masyarakat baik lokal maupun global memerlukan kepedulian serta partisipasi masyarakat untuk berinovasi dan kreatif dalam

⁷⁴ Dian, Deden. Strategi *Pengembangan Desa Wisata (studi kasus Desa Wisata Ponggok)*. JIEP-Vol.19 No 2 November 2019. Universitas Diponegoro Semarang.

⁷⁵ Neneng, Encang, Pawit. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal*. Jurnal Pariwisata Pesona. Vol.3 No.2 Desember 2018. Universitas Padjadjaran Jawa Barat.

pengembangan wilayah desa wisata. Persamaan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sedang perbedaannya ada pada potensi wisata yang dikembangkan.⁷⁶

C. Paradigma Penelitian



Keterangan :

Pemerintah Desa yang dapat mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan baik dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui berbagai unit usaha yang dikembangkan. Perekonomian desa akan bergerak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena melalui unit usaha baru dalam mengembangkan potensi desa akan ada banyak tenaga kerja yang terserap dari masyarakat desa.

⁷⁶ Aditya, Hari, Cipto. *Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*. Jurnal.um.ac.id